

TAHUN 2025



LAPORAN KEUANGAN

GABUNGAN AUDITED

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Gabungan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Denny Wahyu Haryanto

NIP 197112041991011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2025 AUDITED	
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 <i>AUDITED</i>	
- NERACA TAHUN 2025 <i>AUDITED</i>	
- LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2025 <i>AUDITED</i>	
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2025 <i>AUDITED</i>	
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 <i>AUDITED</i>	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	9
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2. Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	10
2.2.1. Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja	10
2.2.2. Capaian Kinerja Keuangan dan Program / Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai.....	12
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	16
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
3.3. Basis Pengukuran dan Pengakuan	17
3.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening Akuntansi.....	17
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	28
4.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	28
4.1.1. Pendapatan	29
4.1.2. Belanja	29
4.2. Neraca	36
4.2.1. Aset	36
4.2.2. Kewajiban	45

4.2.3. Ekuitas	47
4.3. Laporan Operasional.....	48
4.3.1. Kegiatan Operasional	48
4.3.1.1. Pendapatan Operasional	48
4.3.1.2. Beban Operasional	49
4.4. Laporan Perubahan Ekuitas	52
4.4.1. Ekuitas Awal	52
4.4.2. Surplus/Defisit LO	52
4.4.3. Mutasi R/K PPKD	53
4.4.4. Koreksi Ekuitas	53
4.4.5. Ekuitas Akhir	53
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN.....	54
5.1. Gambaran Umum.....	54
5.2. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat	54
5.3. Visi dan Misi	57
5.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	58
5.5. Tujuan dan Sasaran.....	60
5.6. Penghargaan.....	60
BAB VI PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 – Rincian Capaian Keuangan dan Kinerja Program Tahun Anggaran 2025	12
Tabel 4.1 – Alokasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29
Tabel 4.2 – Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja TA 2025 dan 2024.....	30
Tabel 4.3 – Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024.....	32
Tabel 4.4 – Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 4.5 – Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	34
Tabel 4.6 – Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025	34
Tabel 4.7 – Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 4.8 – Rincian Realisasi Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2025 & 2024.....	37
Tabel 4.9 – Rincian Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	37
Tabel 4.10 – Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	37
Tabel 4.11 – Rincian Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	38
Tabel 4.12 – Rincian Saldo Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel 4.13 – Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset 2025 dan 2024	40
Tabel 4.14 – Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025	41
Tabel 4.15 – Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	41
Tabel 4.16 – Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	42
Tabel 4.17 – Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	43
Tabel 4.18 – Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025	44
Tabel 4.19 – Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025.....	44
Tabel 4.20 – Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2025 dan 2024	45
Tabel 4.21 – Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	46
Tabel 4.22 – Perbandingan Utang Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	46
Tabel 4.23 – Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 2025 dan 2024.....	49

Tabel 4.24 – Rincian Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024.....	50
Tabel 4.25 – Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	50
Tabel 4.26 – Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024	51
Tabel 4.27 – Rincian Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	51
Tabel 4.28 – Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	52
Tabel 5.1 – Susunan Organisasi per 31 Desember 2025.....	55
Tabel 5.2 – Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Berita Acara <i>Review Fourpartied</i> LKPD 2025
Lampiran	2	Rekap Pendapatan Penggabung per 31 Desember 2025
Lampiran	3	Rekap Beban Penggabung per 31 Desember 2025
Lampiran	4	Rekap Koreksi Ekuitas Penggabung per 31 Desember 2025
Lampiran	5	Mutasi RK PPKD SKPD Penggabung per 31 Desember 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gabungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggungjawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Denny Wahyu Haryanto

NIP 197112041991011001





**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
(GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**

AUDITED



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

AUDITED



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		215.573.736.251,00	167.998.348.586,00	77,93	166.773.148.564,00
Belanja Barang dan Jasa		126.254.493.840,00	117.415.299.555,00	93,00	143.036.498.328,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		19.999.983.318,00	19.997.448.000,00	99,99	50.910.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		361.828.213.409,00	305.411.096.141,00	84,41	360.719.646.892,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		13.945.129.892,00	12.581.135.809,00	90,22	11.763.931.992,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		205.284.800,00	0,00	0,00	12.336.318,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Ditinjau Kembali)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalin, Jaringin, dan Jangas		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Asat Terap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Asat Lainnya		573.481.708,00	543.908.080,00	94,84	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		14.723.896.408,00	11.125.038.880,00	89,14	11.796.268.310,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		376.552.109.808,00	318.536.131.960,00	84,59	372.495.915.202,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(376.552.109.809,00)	(338.536.131.960,00)		(372.495.915.202,00)
PENBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PENBIAYAAN					
Sisa Lebih Pembiangan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Perusahan-Undanguan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PENBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PENBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengertian Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jangka Waktu		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PENBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Pembiangan Anggaran Tahun Berkecam		(376.552.109.809,00)	(338.536.131.960,00)		(372.495.915.202,00)

Diharapkan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

 DRs. DENNY WAHYU HARYANTO, M.Si
 NIP. 197112041991011001



NERACA TAHUN 2025

AUDITED



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN		CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP			0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas			0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP			0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah			0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara			0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain			0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian			0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan			0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah			0,00	0,00
Piutang Lainnya			0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			0,00	0,00
Uang Muka			0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD			0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD			0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga			0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta			0,00	0,00
Penyisihan Piutang			0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka			2.132.642.852,00	500.134.660,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka			0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka			510.192.852,00	189.223.660,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka			185.000.000,00	16.761.000,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka			1.437.450.000,00	294.150.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka			0,00	0,00
Persediaan			120.964.910.487,00	108.384.914.375,00
Barang Pakai Habis			120.963.296.547,00	108.384.914.375,00
Barang Tak Habis Pakai			1.613.940,00	0,00
Barang Bekas Dipakai			0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan			0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR			123.097.553.339,00	108.885.049.035,00
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara			0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah			0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi			0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan			0,00	0,00
Dana Bergulir			0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal			0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Investasi Dana Abadi Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		60.862.799.000,00	60.862.799.000,00
Peralatan dan Mesin		158.499.533.819,00	147.228.096.883,00
Gedung dan Bangunan		50.362.998.342,00	51.096.698.342,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.283.046.140,00	1.283.046.140,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(171.842.552.877,00)	(154.970.840.020,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(130.022.668.936,00)	(116.669.639.227,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(40.857.599.336,00)	(37.403.068.495,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(962.284.605,00)	(898.132.298,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		99.165.824.424,00	105.499.800.345,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		6.296.250.000,00	6.296.250.004,00
Aset Tidak Berwujud		6.296.250.000,00	6.296.250.004,00
Aset Lain-lain		44.217.304.216,00	44.860.894.692,00
Aset Rusak Berat/Usang		35.545.888.637,00	36.194.875.266,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		8.671.415.579,00	8.666.019.426,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(6.296.250.012,00)	(6.296.250.004,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(43.116.994.483,00)	(40.264.131.210,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(35.375.435.741,00)	(32.527.968.621,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(7.741.558.742,00)	(7.736.162.589,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		1.100.309.721,00	4.596.763.482,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		223.363.687.484,00	218.981.612.862,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		9.076.212.321,00	10.181.889.921,00
Utang Belanja Pegawai		8.819.212.911,00	9.990.346.653,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		256.999.410,00	191.543.268,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		256.999.410,00	191.543.268,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN		CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Bunga			0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi			0,00	0,00
Utang Belanja Hibah			0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah			0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya			0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga			0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil			0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan			0,00	0,00
Utang Belanja BLUD			0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial			0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD			0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD			0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer			0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			0,00	0,00
Utang Transfer			0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan			0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak			0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak			0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan			0,00	0,00
Utang Jaminan			0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah			0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD			0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			9.076.212.321,00	10.181.889.921,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang kepada Pemerintah Pusat			0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat			0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa			0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN			9.076.212.321,00	10.181.889.921,00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas			(104.180.336.287,00)	(163.696.192.261,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan			318.467.811.450,00	372.495.915.202,00
RK PPKD Kas			318.536.131.950,00	372.495.915.202,00
RK PPKD Non Kas			(68.320.500,00)	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Data Riil)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
JUMLAH EKUITAS		214.287.475.163,00	208.799.722.941,00
JUMLAH EKUITAS		214.287.475.163,00	208.799.722.941,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		223.363.687.484,00	218.981.612.862,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

DRS. DENNY WAHYU HARYANTO, M.Si
NIP. 197112041991011001



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2025

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

20601000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		25.146.394.000,00	53.348.536.262,00	(28.202.142.262,00)	(52,86)
Pendapatan Hibah-LO		25.146.394.000,00	53.348.536.262,00	(28.202.142.262,00)	(52,86)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		25.146.394.000,00	53.348.536.262,00	(28.202.142.262,00)	(52,86)
BEBAN					
BEBAN OPERASI		316.499.303.652,00	360.068.584.593,00	(43.569.280.941,00)	(12,10)
Beban Pegawai		166.827.214.844,00	166.821.905.441,00	5.309.403,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		129.674.640.808,00	142.336.679.152,00	(12.662.038.344,00)	(8,90)
Beban Barang		40.714.775.482,00	52.260.596.086,00	(11.545.820.604,00)	(22,09)
Beban Jasa		86.420.273.033,00	86.668.443.004,00	(248.169.971,00)	(0,29)
Beban Pemeliharaan		2.539.592.293,00	3.407.640.062,00	(868.047.769,00)	(25,47)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		19.997.448.000,00	50.910.000.000,00	(30.912.552.000,00)	(60,72)
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		14.956.042.208,00	13.191.409.389,00	1.764.632.819,00	13,38
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		13.846.210.170,00	11.526.813.402,00	2.319.396.768,00	20,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		856.137.735,00	1.431.458.446,00	(575.320.711,00)	(40,19)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		64.152.307,00	64.152.307,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		189.541.996,00	168.985.234,00	20.556.762,00	12,16
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		331.455.345.860,00	373.259.993.982,00	(41.804.648.122,00)	112,61
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(306.308.951.860,00)	(319.911.457.720,00)	13.602.505.860,00	(4,25)
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
20401400 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Data Riil)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5-34	6-74
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BEASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BEASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(306.508,95) 360,00	(518.911.457,72) 0,00	15.402.585.360,00	(4,25)

Diklat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


DRS. DENNY WAHYU HARYANTO M.SI
NIP. 197112041991011001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2025

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		(163.696.192.261,00)	(157.336.691.357,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		372.495.915.202,00	313.551.956.812,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		208.799.722.941,00	156.215.265.455,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		372.495.915.202,00	313.551.956.812,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(372.495.915.202,00)	(313.551.956.812,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		208.799.722.941,00	156.215.265.455,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus-Defisit LO		(306.308.951.660,00)	(319.911.457.720,00)
Mutasi RK PPKD		318.467.811.450,00	372.495.915.202,00
Koreksi Ekuitas		(6.671.107.368,00)	4,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		5.487.752.222,00	52.584.457.486,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(104.180.336.287,00)	(163.696.192.261,00)
RK PPKD		318.467.811.450,00	372.495.915.202,00
EKUITAS AKHIR		214.287.475.163,00	208.799.722.941,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI DKI JAKARTA


DRS. DENNY WAHYU HARYANTO, M.SI

NIP. 197112041991011001



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Gabungan Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Dinas selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

*Landasan Hukum
Penyusunan Laporan
Keuangan*

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; dan
6. Perubahan posisi keuangan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 17. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

31. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
32. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus

kas dan komponen- komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.



BAB II

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB II: IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selama Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui fase Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Fase Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31

Desember 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/DPA/2025 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp393.691.293.818,00 , Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/DPA/2025 tanggal 28 April 2025 sebesar Rp390.230.222.754,00 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/P-DPA/2025 tanggal 25 September 2025 sebesar Rp376.552.109.809,00 , Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp318.536.131.950,00 atau mencapai 84,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp376.552.109.809,00.

2.2. Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp318.536.131.950,00 atau 84,59 persen dari pagu anggaran sebesar Rp376.552.109.809,00. Serta Persentase kinerja fisik adalah sebesar 100 persen karena realisasi kinerja fisik dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.2.1. Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Dukcapil Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90.50	91	91,5	92

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
1	2	3	5	6	7	8	9
2	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,29	99,43	99,46	99,50

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	97,87	90,50	91	91,5	92	92
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,47%	99,29	99,43	99,46	99,50	99,50
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,32	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,59	99,50	99,75	99,80	99,88	99,88
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	120	89,29	92,86	96,43	100	100
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	100	100	100	100	100
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4

Target Kinerja strategis Dan Realisasi Kinerja 2025

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99	99,91
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,8	99,98
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	96,43	120
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4

Realisasi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal tersebut didorong oleh berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 1) Melakukan pelayanan Jum'at petang, 2) Melakukan pelayanan daring (online), 3) Membentuk Kamsa (Kampung Sadar Adminduk), 4) Melakukan pelayanan adminduk secara mobile ke Sekolah/Pos RT/RW/ Event tertentu/ Jemput Bola Diasabilitas dan Lansia, 5) Melakukan Program Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili yang diharapkan dapat membuat data kependudukan semakin akurat.

2.2.2. Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan kinerja yang tidak tercapai

Rincian capaian keuangan dan kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Capaian Keuangan dan Kinerja Program Tahun Anggaran 2025

Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan %	Target Output	Realisasi Volume Output	Progres Capaian Output %
Program Pendaftaran Penduduk	88.325.326.078	86.344.621.481	97,76%	100	100	100,00%
Program Pencatatan Sipil	5.511.999.389	5.004.183.483	90,79%	100	100	100,00%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.633.244.866	1.532.347.053	93,82%	100	100	100,00%

Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan %	Target Output	Realisasi Volume Output	Progres Capaian Output %
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	375.005.168	358.907.180	95,71%	100	100	100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	280.706.534.308	225.296.072.753	80,26%	100	100	100,00%
Total	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59%	37,34	36,7	98,29%



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III: KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Pelaporan Keuangan
Daerah*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca, dan;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-

Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah basis

Entitas
Akuntansi/Entitas
Pelaporan Keuangan
Daerah

Basis Akuntansi

akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran

3.3. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi

3.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan akuntansi pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan-LRA dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b.) Pendapatan Transfer; dan c.) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat: a.) diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); b.) diterima oleh SKPD; dan c.) diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Akuntansi pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas.

2. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - o Ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - o Organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - o Fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belanja diakui pada saat: a.) Terjadinya pengeluaran pada RKUD; dan b.) apabila melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU), pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (Surat Pertanggungjawaban atau SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.
- Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (Surat Perintah Pencairan

Belanja

Dana/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah, dan diukur berdasarkan azas bruto.

- Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - o Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
 - o Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan;
 - o Perolehan barang tersebut untuk digunakan bukan untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - o Nilai Rupiah pembelian barang memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap, sebagaimana penjelasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-Alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pendapatan-LO

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a.) Belanja Operasi; b.) Belanja Modal; c.) Belanja Tak Terduga; dan d.) Transfer, serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO; b.) Pendapatan Transfer-LO; c.) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO; d.) Surplus Non Operasional-LO; dan e.) Pendapatan Luar Biasa-LO.
- Pendapatan-LO diakui pada saat: a.) timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan b.) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO secara umum dicatat: a.) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan b.) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- Beban diakui pada saat: a.) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; b.) Terjadinya konsumsi aset; dan c.) Timbulnya kewajiban.
- Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.
- Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- Beban Jasa, Barang, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA/PPK.
- Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Mapping Belanja ke Beban adalah sebagai berikut:

LRA (Permendagri Nomor 13 Tahun 2016)		Laporan Operasional	
No. Akun	Uraian	No. Akun	Uraian
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.1.05	Beban Pemeliharaan
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.1.03	Beban Barang
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.1.03	Beban Barang
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.1.05	Beban Pemeliharaan
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.27	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	9.1.04	Beban Jasa

Aset

Aset Lancar

Aset Tetap

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

● Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode akuntansi dan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

● Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-Alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

- **Penyusutan Aset Tetap**
 - Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - Masa Manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan masa mendatang dilakukan penyesuaian.

- Tabel Masa Manfaat Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
	- Alat-Alat Kantor	5
	- Alat-Alat Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
4.1	Jalan/Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Tidak disusutkan
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak disusutkan

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB IV

PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV: PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan Pos-Pos
Laporan Realisasi
Anggaran

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/DPA/2025 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp393.691.293.818,00, Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/DPA/2025 tanggal 28 April 2025 sebesar Rp390.230.222.754,00 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/P-DPA/2025 tanggal 25 September 2025 sebesar Rp376.552.109.809,00, Realisasi

Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp318.536.131.950,00 atau mencapai 84,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp376.552.109.809,00.


Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)				Total Anggaran Belanja
	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	
Anggaran Semula	228.884.310.325	128.689.700.407	19.999.983.318	16.117.299.768	393.691.293.818
Perubahan Anggaran	(13.310.574.074)	(2.435.206.567)	-	(1.393.403.368)	(17.139.184.009)
Total	215.573.736.251	126.254.493.840	19.999.983.318	14.723.896.400	376.552.109.809

Pendapatan
Rp0,00

4.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Pendapatan LRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya“, maka sejak Tahun 2015 tidak ada lagi pendapatan yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Belanja
Rp318.536.131.950,00

4.1.2. Belanja

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktifitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp318.536.131.950,00 atau mencapai 84,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp376.552.109.809,00. Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Daerah				
Belanja Operasi	361.828.213.409	305.411.096.141	84,41%	360.719.646.892
Belanja Pegawai	215.573.736.251	167.998.348.586	77,93%	166.773.148.564
Belanja Barang dan Jasa	126.254.493.840	117.415.299.555	93,00%	143.036.498.328
Belanja Hibah	19.999.983.318	19.997.448.000	99,99%	50.910.000.000
Belanja Modal	14.723.896.400	13.125.035.809	89,14%	11.776.268.310
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.945.129.892	12.581.135.809	90,22%	11.763.931.992
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.284.800	-	0,00%	12.336.318
Belanja Modal Aset Lainnya	573.481.708	543.900.000	94,84%	-
Jumlah Belanja	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59%	372.495.915.202

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 mengalami Penurunan sebesar 14,49 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penurunan signifikan pada Belanja hibah, dikarenakan realisasi hibah pada tahun 2024 sebesar 50.910.000.000 masih memenuhi kebutuhan blanko KTP el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari. Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta hanya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp361.828.213.409,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp305.411.096.141,00 atau 84,41%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp360.719.646.892,00 terdapat penurunan sebesar Rp55.308.550.751,00 atau 15,33%. Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai
Rp167.998.348.586,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp215.573.736.251,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp167.998.348.586,00 atau 77,93%.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 yang tidak terserap sebesar Rp47.575.387.665,00 atau 22,07% dikarenakan tidak terserapnya anggaran mutasi masuk pegawai yang semula dianggarkan untuk 40 orang namun hanya teralisasi sebanyak 11 orang, tidak terserapnya gaji dan tunjangan CPNS yang semula dianggarkan untuk 76 formasi namun hanya terealisasi 40 formasi CPNS yang masuk ke Dinas Dukcapil. Pergeseran Tanggal Mulai Tugas (TMT) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Awalnya, anggaran telah

dialokasikan dengan asumsi pengangkatan CPNS berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Namun, dalam pelaksanaan, pengangkatan CPNS baru terealisasi dengan TMT 1 Juni 2025. Pergeseran ini berdampak pada penyerapan anggaran gaji pokok dan tunjangan CPNS, termasuk alokasi anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 bagi CPNS yang baru diangkat. Karena masa kerja CPNS mengalami pergeseran dari rencana awal, maka pembayaran gaji ke-13 yang seharusnya diberikan pada semester pertama juga tidak dapat direalisasikan.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp166.773.148.564,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.225.200.022,00 atau 0,73%. Kenaikan tersebut disebabkan mulai dari awal tahun 2025 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sudah di tanggung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan pada tahun 2024 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baru ditanggung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bulan Mei.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025:


Tabel 4.3
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
PEGAWAI NEGERI SIPIL				
Gaji Pokok PNS	26.132.882.396	19.651.247.780	75,20%	19.515.738.000
Tunjangan Keluarga PNS	2.324.196.018	1.873.667.638	80,62%	1.921.372.866
Tunjangan Jabatan PNS	864.669.500	702.005.000	81,19%	743.760.000
Tunjangan Fungsional PNS	193.358.357	113.060.000	58,47%	128.880.000
Tunjangan Fungsional Umum PNS	975.706.889	742.650.000	76,11%	708.610.000
Tunjangan Beras PNS	1.304.139.111	1.070.077.920	82,05%	1.079.275.260
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.942.435.388	19.699.346.620	54,81%	19.724.485.522
Belanja Pembulatan Gaji PNS	725.987	227.572	31,35%	223.575
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.142.472.295	3.980.169.221	77,40%	4.373.415.900
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	139.018.117.325	116.897.855.541	84,09%	117.334.105.748
Jumlah Belanja Pegawai (PNS)	211.898.703.266	164.730.307.292	77,74%	165.529.866.871
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
Gaji Pokok PPPK	823.982.740	799.100.557	96,98%	511.066.000
Tunjangan Keluarga PPPK	115.357.584	63.162.307	54,75%	253.192.72
Tunjangan Fungsional PPPK	89.831.000	82.247.499	91,56%	53.190.000
Tunjangan Beras PPPK	54.745.313	47.296.295	86,39%	23.608.920
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	96.600.000	19.331.588	20,01%	-
Pembulatan Gaji PPPK	15.598	14.918	95,64%	9.679

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.494.500.750	2.256.888.130	90,47%	630.087.822
Jumlah Belanja Pegawai (PPPK)	3.675.032.985	3.268.041.294	88,93%	1.243.281.693
Total Belanja Pegawai	215.573.736.251	167.998.348.586	77,93%	166.773.148.564

Belanja Barang dan Jasa

Rp117.415.299.555,00

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp126.254.493.840,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117.415.299.555,00 atau 93,00%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 belum terserap sebesar Rp8.839.194.285,00 atau 7,00%.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp143.036.498.328,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.621.198.773,00 atau 17,91%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117.415.299.555,00 di antaranya merupakan:

- Realisasi belanja barang sebesar Rp27.137.423.371,00;
- Realisasi belanja jasa sebesar Rp86.594.983.891,00; dan
- Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp3.682.892.293,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	30.856.254.333	27.137.423.371	87,95%
Belanja Jasa	90.987.599.056	86.594.983.891	95,17%
Belanja Pemeliharaan	4.410.640.451	3.682.892.293	83,50%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	126.254.493.840	117.415.299.555	93,00%

Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	REALISASI		Naik/Turun	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang	27.137.423.371	54.963.026.979	(27.825.603.608)	(50,63%)
Belanja Jasa	86.594.983.891	84.371.681.287	2.223.302.604	2,64%
Belanja Pemeliharaan	3.682.892.293	3.701.790.062	(18.897.769)	(0,51%)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	117.415.299.555	143.036.498.328	(25.621.198.773)	(17,91%)

Belanja Hibah

Rp19.997.448.000,00

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp19.999.983.318,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.997.448.000,00 atau 99,99%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

Uraian	TA 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19.999.983.318	19.997.448.000	99,99%
Jumlah Belanja Hibah	19.999.983.318	19.997.448.000	99,99%

Belanja Modal

Rp13.125.035.809,00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,

Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.723.896.400,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.125.035.809,00 atau 89,14% mengalami kenaikan sebesar Rp1.348.767.499,00 atau 11,45% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.776.268.310,00.

Rincian Belanja Modal pada Dinas Dukcapil dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.945.129.892	12.581.135.809	90,22%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.284.800	-	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	573.481.708	543.900.000	94,84%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	14.723.896.400	13.125.035.809	89,14%

Rincian Belanja Modal pada Dinas Dukcapil dijelaskan sebagai berikut:

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp13.945.129.892,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.581.135.809,00 atau 90,22%, mengalami peningkatan sebesar Rp817.203.817,00 atau 6,95% dari realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp11.763.931.992,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
3. Belanja Modal Komputer

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp205.284.800,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp573.481.708,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp543.900.000,00 atau 94,84%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

*Penjelasan Pos-Pos
Neraca*

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu.

Aset

Rp223.363.687.484,00

4.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

Rp123.097.553.339,00

4.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun maksudnya perpindahan aset tersebut dapat bergerak cepat. Aset lancar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 dan 2024 berupa Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

*Kas di Bendahara
Pengeluaran*

Rp0,00

4.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GUP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal neraca.

Beban Dibayar Dimuka
Rp2.132.642.852,00

4.2.1.1.2. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rincian Realisasi Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2025 & 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih (Rp)	%
Beban Dibayar Dimuka				
Beban Barang Dibayar Dimuka	510.192.852	189.223.660	320.969.192	169,62%
Beban Jasa Dibayar Dimuka	185.000.000	16.761.000	168.239.000	1003,75%
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	1.437.450.000	294.150.000	1.143.300.000	388,68%
JUMLAH	2.132.642.852	500.134.660	1.632.508.192	326,41%

a. Beban Barang Dibayar Dimuka

Belanja Barang Dibayar Dimuka merupakan sisa saldo Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2025. Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp510.192.852,00 dan Rp189.223.660,00.

Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rincian Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Uraian	Beban Barang Dibayar Dimuka (Rp)
Dinas Dukcapil	47.893.823
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	29.497.754
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	51.768.019
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	80.885.326
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	4.857.073
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	261.781.087
UPTIK	32.322.235
UPAK	1.187.535
JUMLAH	510.192.852

b. Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp185.000.000,00 dan Rp16.761.000,00.

Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Uraian	Beban Jasa Dibayar Dimuka (Rp)
Uptik	
Oracle Diagnostic Pack	185.000.000
JUMLAH	185.000.000

c. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.437.450.000,00 dan Rp294.150.000,00.

Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11
Rincian Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Uraian	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka (Rp)
<i>Uptik</i>	
Oracle ATS Tuning Pack	114.700.000
Oracle Database Enterprise Edition	1.322.750.000
JUMLAH	1.437.450.000

Persediaan

Rp120.964.910.487,00

4.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp120.964.910.487,00 dan Rp108.384.914.375,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan. Penilaian persediaan pada SKPD/UKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO).

Jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan jenis persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai.

a. Barang Pakai Habis

Rincian Saldo Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rincian Saldo Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)
Dinas Dukcapil	60.480.513.782	46.328.121.497
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	9.459.090.813	7.141.257.192
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	7.635.867.672	7.870.235.079
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	15.518.631.553	16.979.750.361
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	10.457.212.393	9.689.118.967
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	15.215.570.853	18.015.037.376
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	525.566.866	342.652.417
UPTIK	513.560.645	577.293.215
UPAK	1.157.281.970	1.441.448.271
JUMLAH	120.963.296.547	108.384.914.375

b. Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.613.940,00 berada di Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat yaitu berupa pipa pvc.

c. Persediaan Usang

Persediaan Usang/Rusak merupakan persediaan bahan pakai habis yang sudah tidak terpakai. Nilai Persediaan yang telah usang tidak disajikan di Neraca, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Persediaan Usang pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

SKPD	Barang Pakai Habis		Nomor Surat Usulan Penghapusan
	Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan	
Dinas Dukcapil	266.172.040		Akan diusulkan Surat Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca kepada Gubernur pada bulan Juni 2026
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	143.885.844		Akan diusulkan Surat Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca kepada Gubernur pada bulan Juni 2026
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat		59.408.494	Surat Permohonan Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca dengan Nomor: 5273/UD.02.01 Tanggal 12 Mei 2026 kepada Gubernur DKI Jakarta c.q Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta

Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	84.266.400		Akan diusulkan Surat Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca kepada Gubernur pada bulan Juni 2026
UPAK	912.000		Akan diusulkan Surat Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca kepada Gubernur pada bulan Juni 2026
Jumlah Persediaan Usang	495.236.284	59.408.494	

Aset Tetap
Rp99.165.824.424,00
4.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp99.165.824.424,00 dan Rp105.499.800.345,00. Selama Tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp19.772.088.124,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp9.234.351.188,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.13
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Tanah	60.862.799.000	-	-	60.862.799.000
Peralatan dan Mesin	147.228.096.883	19.772.088.124	8.500.651.188	158.499.533.819
Gedung dan Bangunan	51.096.698.342	-	733.700.000	50.362.998.342
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.283.046.140	-	-	1.283.046.140
Nilai Perolehan	260.470.640.365	19.772.088.124	9.234.351.188	271.008.377.301
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(116.669.639.227)	16.935.013.789	3.581.984.080	(130.022.668.936)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(37.403.068.495)	4.621.892.886	1.167.362.045	(40.857.599.336)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(898.132.298)	64.152.307	-	(962.284.605)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(154.970.840.020)	21.621.058.982	4.749.346.125	(171.842.552.877)
Jumlah Aset Tetap	105.499.800.345	(1.848.970.858)	(4.485.005.063)	99.165.824.424

Tanah
Rp60.862.799.000,00
4.2.1.2.1. Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 tidak

mengalami perubahan dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp60.862.799.000,00. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025

Uraian	Luas	Lokasi	Nilai (Rp.)
Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta	2.803 m ²	Jalan Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat	36.436.240.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur	1.120 m ²	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Jakarta Timur	1.853.600.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara	1.075 m ²	Jalan Berdikari No. 2 Jakarta Utara	1.851.150.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat	3.536 m ²	Jalan Komplek Perkulakan Makro	4.055.792.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan	1.104 m ²	Jalan Radio V No. 6 Jakarta Selatan	16.666.017.000
Jumlah Aset Tetap-Tanah			60.862.799.000

Peralatan dan Mesin
Rp158.499.533.819,00

4.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp158.499.533.819,00 dan Rp147.228.096.883,00 Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
147.228.096.883	19.772.088.124	8.500.651.188	158.499.533.819

Transaksi mutasi penambahan sebesar Rp19.772.088.124,00 pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa:

1. Belanja Modal sebesar Rp12.581.135.809,00 , Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar serta Belanja Modal Komputer.
2. Transfer Masuk dari SKPD Lain Rp6.457.252.315,00 berupa transfer scanner, mini bus, komputer dan laptop.
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) Rp733.700.000,00, berupa Elevator atau Lift.

Transaksi mutasi pengurangan sebesar Rp8.500.651.188,00 pada Tahun Anggaran 2025 berupa:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain Rp6.267.292.315,00, berupa transfer scanner dan Komputer.

2. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat Rp1.412.087.180,00,
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Rp5.396.153,00, berupa Lemari dan Meja
4. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai Rp341.641.350,00 berupa garpu
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) Rp392.138.565,00, berupa jam elektronik, hard disk, dan kursi kerja.
6. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai 17.925.625,00 berupa ncomputing
7. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2025) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) Rp64.170.000,00 berupa hard disk dan flash disk.

Gedung dan Bangunan

Rp50.362.998.342,00

4.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp50.362.998.342,00 dan Rp51.096.698.342,00. Mutasi pada Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 4.16
Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
51.096.698.342	-	733.700.000	50.362.998.342

Transaksi mutasi pengurangan sebesar Rp733.700.000,00 pada Tahun Anggaran 2025 adalah Reklasifikasi antar Aset Tetap berupa Elevator atau Lift.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 1.283.046.140,00

4.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo aset tetap berupa Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.283.046.140,00 terdapat pada entitas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan Penambahan Daya Listrik pada Pembangunan Gardu Listrik dalam Bangunan di Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur sesuai BAST Nomor: 3235/-076.343 Tanggal 13 Desember 2017.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(Rp171.842.552.877,00)

4.2.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp171.842.552.877,00) dan (Rp154.970.840.020,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(130.022.668.936)	(116.669.639.227)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(40.857.599.336)	(37.403.068.495)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(962.284.605)	(898.132.298)
Total	(171.842.552.887)	(154.970.840.020)

Aset Lainnya
Rp1.100.309.721,00

4.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan.

Aset Tidak Berwujud
Rp6.296.250.000,00

4.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.296.250.000,00 dan Rp6.296.250.004,00. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa aplikasi Sistem Operasi dan Database yang digunakan untuk menunjang pelayanan kependudukan yang berada pada entitas Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) dan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
UPTIK				
Licensi Oracle	2020	8	759.875.000	6.079.000.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Pusat				
Oracle Database	2012	1	217.250.000	217.250.000
Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025				6.296.250.000

Akumulasi Amortisasi
Aset Tidak Berwujud
Rp(6.296.250.012,00)

4.2.1.3.2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 sebesar Rp(6.296.250.012,00) dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp(6.296.250.004,00).

Aset Lain-lain
Rp44.217.304.216,00

4.2.1.3.3. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp44.217.304.216,00 dan Rp44.860.894.692,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.19
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Jenis Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Rusak Berat / Usang	36.194.875.266	1.412.087.180	2.061.073.809	35.545.888.637
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Perubahan Status Aset (MPSA)	8.666.019.426	5.396.153		8.671.415.579
Total	44.860.894.692	1.417.483.333	2.061.073.809	44.217.304.216

Penjelasan atas perubahan Aset Lain-Lain diantaranya berupa:

a. Penambahan Aset Rusak Berat

Penambahan Aset Rusak Berat adalah penambahan aset berupa peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Penambahan Aset Rusak Berat (Rp)
Dinas Dukcapil	76.771.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	88.426.175
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	472.539.638
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	103.642.380
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	32.945.000
UPTIK	570.429.237
UPAK	67.333.750
Jumlah Penambahan Aset Rusak Berat	1.412.087.180

b. Penghapusan Aset Rusak Berat

Penghapusan Aset Rusak Berat adalah penghapusan aset berupa peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Penghapusan Aset Rusak Berat (Rp)
Dinas Dukcapil	268.700.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	1.518.967.809
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	273.406.000
Jumlah Penghapusan Aset Rusak Berat	2.061.073.809

c. Penambahan Aset MPSA

Penambahan Aset MPSA berada pada Sudin Dukcapil Jakarta Utara dan Sudin Dukcapil Jakarta Timur berupa Meja.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
Rp(43.116.994.483,00)

4.2.1.3.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 sebesar Rp(43.116.994.483,00), terdiri dari akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp(35.375.435.741,00) dan akumulasi penyusutan aset dalam proses penyelesaian Majelis Pertimbangan Status Aset (MPSA) sebesar Rp(7.741.558.742,00). Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 sebesar Rp(40.264.131.210,00), terdiri dari akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp(32.527.968.621,00) dan akumulasi penyusutan aset dalam proses penyelesaian Majelis Pertimbangan Status Aset (MPSA) sebesar Rp(7.736.162.589,00).

Kewajiban
Rp9.076.212.321,00

4.2.2. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.076.212.321,00 dan Rp10.181.889.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.20
Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	9.076.212.321	10.181.889.921
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH		9.076.212.321	10.181.889.921

4.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.076.212.321,00 dan Rp10.181.889.921,00 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja	9.076.212.321	10.181.889.921
JUMLAH		9.076.212.321	10.181.889.921

4.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing **Rp9.076.212.321,00** dan **Rp10.181.889.921,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.22
Perbandingan Utang Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Utang Belanja Pegawai	8.819.212.911	9.990.346.653	(1.171.133.742)	(11,72%)
Utang Belanja Jasa	256.999.410	191.543.268	65.456.142	34,17%
Total	9.076.212.321	10.181.889.921	(1.105.677.600)	(10,86%)

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah **Rp8.819.212.911,00**.

Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Belanja Pegawai	Jumlah (Rp)
Dinas Dukcapil	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Desember 2025	256.303.508
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Desember 2025	8.218.413.990
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS PLT Desember 2025	12.870.000
Kekurangan Pembayaran TPP Bulan Oktober 2025	3.547.800
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Desember 2025	328.077.613
Total Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025	8.819.212.911

Utang Belanja
Rp9.076.212.321,00

Utang Belanja Pegawai
Rp8.819.212.911,00

Utang Belanja Jasa
Rp256.999.410,00

2. Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah **Rp256.999.410,00**.

Rincian Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025
Dinas Dukcapil	
Belanja Tagihan Listrik Gedung Dinas Pemakaian Desember	86.724.077
Belanja Tagihan Listrik Gedung Arsip Pemakaian Desember	6.320.355
Belanja Tagihan Telepon Pemakaian Desember	831.601
Belanja Jasa Penyimpanan Arsip	71.928.000
Jumlah Dinas Dukcapil	165.804.033
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	
Belanja Tagihan Air Pemakaian Desember	1.938.184
Belanja Tagihan Telepon Pemakaian Desember	166.944
Belanja Tagihan Listrik Pemakaian Desember	18.916.252
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	21.021.380
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	
Belanja Tagihan Telepon Pemakaian Desember	263.736
Belanja Tagihan Listrik Pemakaian Desember	26.874.485
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	27.138.221
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	
Belanja Tagihan Telepon Pemakaian Desember	240.616
Belanja Tagihan Listrik Pemakaian Desember	20.421.355
Belanja Tagihan Air Pemakaian Desember	7.023.184
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	27.685.155
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	
Belanja Tagihan Telepon Pemakaian November	260.850
Belanja Tagihan Listrik Pemakaian Desember	15.089.771
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	15.350.621
Jumlah Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025	256.999.410

Ekuitas
Rp214.287.475.163,00

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp214.287.475.163,00 dan Rp208.799.722.941,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 4.4.

4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.3.1. Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2025, Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(306.308.951.860,00) dan Rp(319.911.457.720,00). Jumlah Tahun 2025 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp25.146.394.000,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp331.455.345.860,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

4.3.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah. Pendapatan-LO Dinas Dukcapil Tahun 2025 sebesar Rp25.146.394.000,00 seluruhnya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO .

4.3.1.1.1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada Dinas Dukcapil merupakan Pendapatan Hibah berupa Blanko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri.



Tabel 4.23

Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2025	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Hibah - LO	25.146.394.000	53.348.536.262	(28.202.142.262)	(52,86%)
Total	25.146.394.000	53.348.536.262	(28.202.142.262)	(52,86%)

Beban - LO

Rp331.455.345.860,00

4.3.1.2 Beban Operasional

Beban Daerah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Tahun 2025 sebesar Rp331.455.345.860,00 seluruhnya merupakan Beban Operasi. Beban Tahun 2025 mengalami penurunan

sebesar 11,20% atau sebesar Rp41.804.648.122,00 dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.24
Rincian Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	166.827.214.844	166.821.905.441	5.309.403	0,00%
Beban Barang	40.714.775.482	52.260.596.086	(11.545.820.604)	(22,09%)
Beban Jasa	86.420.273.033	86.668.443.004	(248.169.971)	(0,29%)
Beban Pemeliharaan	2.539.592.293	3.407.640.062	(868.047.769)	(25,47%)
Beban Hibah	19.997.448.000	50.910.000.000	(30.912.552.000)	(60,72%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.956.042.208	13.191.409.389	1.764.632.819	13,38%
Jumlah Beban	331.455.345.860	373.259.993.982	(41.804.648.122)	(11,20%)

Beban Pegawai
Rp166.827.214.844,00

4.3.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp166.827.214.844,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25
Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	166.827.214.844	166.821.905.441	5.309.403	0,0032%
Total	166.827.214.844	166.821.905.441	5.309.403	0,0032%

Beban Barang
Rp40.714.775.482,00

4.3.1.2.2 Beban Barang

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2025. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2025, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2025, persediaan akhir per 31 Desember 2025, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

Jumlah Beban Barang pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp40.714.775.482,00 dan Rp52.260.596.086,00.

Rincian Beban Barang pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.26
Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang	40.714.775.482	52.260.596.086	(11.545.820.604)	(22,09%)
Total	40.714.775.482	52.260.596.086	(11.545.820.604)	(22,09%)

Beban barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp40.714.775.482,00 tersebut terdiri atas beban persediaan dan beban non-persediaan yang masing masing nilainya sebesar Rp39.235.294.982,00 dan Rp1.479.480.500,00.

Beban Jasa

Rp86.420.273.033,00

4.3.1.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan konsumsi atas jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp86.420.273.033,00 dan Rp86.668.443.004,00.

Rincian Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27
Rincian Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang	86.420.273.033	86.668.443.004	(248.169.971)	(0,29%)
Total	86.420.273.033	86.668.443.004	(248.169.971)	(0,29%)

Beban Pemeliharaan

Rp2.539.592.293,00

4.3.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah Rp2.539.592.293,00 dan Rp3.407.640.062,00.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 4.28 berikut ini:

Tabel 4.28
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan	2.539.592.293	3.407.640.062	(868.047.769)	(25,47%)
Total	2.539.592.293	3.407.640.062	(868.047.769)	(25,47%)

Beban pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp2.539.592.293,00 terdiri dari:

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2025 Rp214.287.475.163,00 dan per 31 Desember 2024 Rp208.799.722.941,00.

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah Rp208.799.722.941,00 dan Rp156.215.265.455,00. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

4.4.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp306.308.951.860,00) dan (Rp319.911.457.720,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penjelasan Pos-Pos
Laporan Perubahan
Ekuitas
Rp214.287.475.163,00*

*Ekuitas Awal
Rp208.799.722.941,00*

*Surplus/(Defisit) LO
(Rp306.308.951.860,00)*

Mutasi R/K PPKD
Rp318.467.811.450,00
4.4.3. Mutasi R/K PPKD

Mutasi R/K PPKD merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari KAS Daerah. Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp318.467.811.450,00 dan Rp372.495.915.202,00.

Koreksi Ekuitas
Rp(6.671.107.368,00)
4.4.4. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(6.671.107.368,00) dan Rp4,00. Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya.

Ekuitas Akhir
Rp214.287.475.163,00
4.4.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp214.287.475.163,00 dan Rp208.799.722.941,00. Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Gambaran Umum

5.1. Gambaran Umum

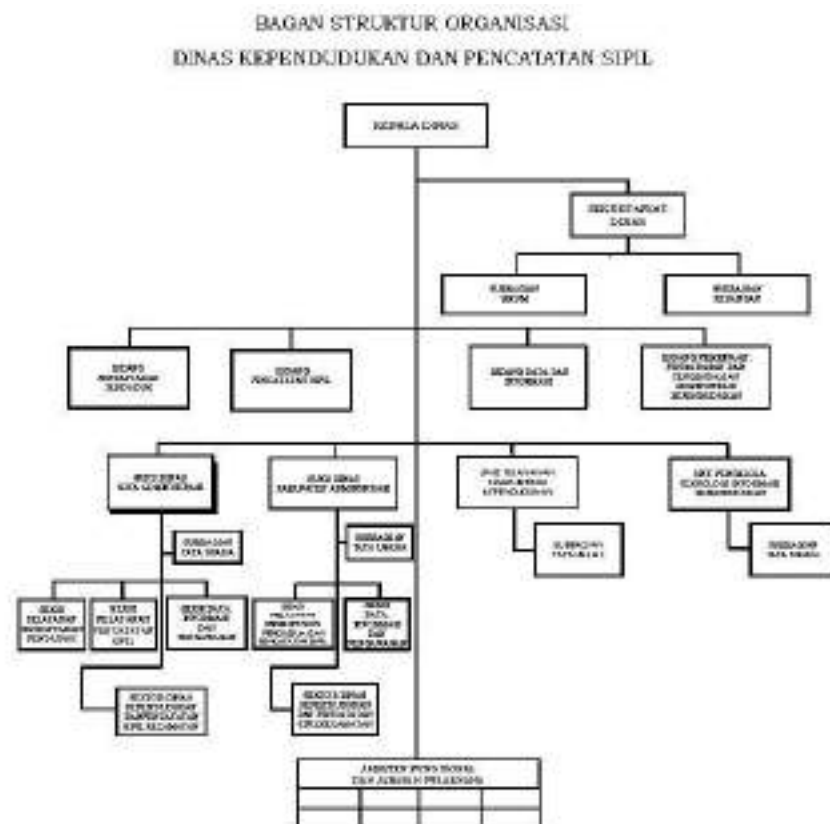
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

**Struktur Organisasi
dan Nama Pejabat**

5.2. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:



Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025

No	Jabatan	Nama Pejabat
a	Kepala Dinas	Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si
b	Sekretaris Dinas	Muhammad Nurrahman, S.Kom, MM
	1. Kepala Subbagian Umum	Sudarman Tetraginanwar, SH
	2. Ketua Subkelompok Kepegawaian	Yusuf Indra Hanafiah, S.IP
	3. Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran	Nadia Maharani, SE
	4. Kepala Subbagian Keuangan	Vina Hasnawati, SE
c	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Shanti, S.Sos, MA
	1. Ketua Subkelompok Identitas Penduduk	Yudi Hermawan, S.S, M.Si
	2. Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Moris Pricahyadi, S.Kom, M.Tr.A.P
	3. Ketua Subkelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Achmad Sopian, S.Kom
d	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Witri Yenny, S.Sos, M.Si
	1. Ketua Subkelompok Kelahiran dan Kematian	Vaulia Mangiwa, S.AB
	2. Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian	Faqih Zuhri, SE
	3. Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Heru Suprpto, S.Kom, M.TI
e	Kepala Bidang Data dan Informasi	Firman, ST
	1. Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi	-
	2. Ketua Subkelompok Analisa dan Pemutakhiran Data	Ari Nur Ariffianto, S.Si
	3. Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital	Eka Frentina Yulianti, ST, M.MSi
f	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Sudirman, SH
	1. Ketua Subkelompok Pembinaan	Dyah Virasari Nurul Jannati, S.Sos, MBA
	2. Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan	Abdul Khaer, S.Kom
	3. Ketua Subkelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan	Muhammad Fahri, S.AP
g	Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Desmond, S.Si, MM
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Nita Noerhayati, SE
	2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Budi Wibawa, SH
	2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil	Mochamad Fifin Heriawan, SE
	3. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Artyas Farakhan Laksmiawahni, S.Kom

No	Jabatan	Nama Pejabat
h	Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Hari Wibowo, MAP
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Condro Prabowo, S.Kom, M.AP
	2. Kepala Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan	Amar Habibi, S.Kom
	3. Kepala Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database	Andi Wijaya, S.Kom
	4. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Pusat	-
	5. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu	Yudistira, SE
	6. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Barat	-
	7. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Selatan	Didi Rachmadi, S.Kom
	8. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Timur	Djoko Wirananggapati, S.Kom
i	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Pusat	Syamsu Bachri, S.Sos, ME
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Irpan Septian, S.Kom, M.A.P
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Agus Suryono, SP, M.Si
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Kartika Sitorus, MKM
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Ida Khairany, SE
j	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara	Asep Mulyaman, S.Sos, Map
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Teti Herawati, SE
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pandapotan Sinambela, S.AP, MM
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Erlita Faskho, SH, MM
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Kristanti, S.Theo
k	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat	Gentina Arifin, S.Kom, M.Ti
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Andika Bayu Permana, S.Kom
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Umaryadi, S.Kom
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Mia Mahayati, SE
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Mario Aldino, S.Kom
l	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan	Salimin, S.Sos
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Ivon Tiar Mora, S.HUT
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Devi Triska Kustiana, S.Kom, M.A.P
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Mohamad Riadhi Nugroho, SE
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Agung Dwi Susanto
m	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur	Ade Himawan, AP, M.Si
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Sutikno, S.Sos, MAP
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Selvianti Yusnitasari, S.Si
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Aris Munanto, SE
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Bumy Hidayat, A.Md

No	Jabatan	Nama Pejabat
n	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Raditya Wirawan, S.Kom, M.T.I
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Adi Widianoro, S.IP
2.	Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Anah Novianti, SH
3.	Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Angga Noviar Saputra, S.AP

Visi dan Misi

5.3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan konsep RPD 2023-2026 dengan mempertimbangkan Visi Pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah **“Mencapai Kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan”**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memegang peranan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memiliki Sasaran : **“Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat”**

Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026

Mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan

yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat.

Adapun isu strategis dalam mencapai Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026 adalah dengan melaksanakan : **“Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik”**

- Peningkatan kolaborasi pemerintah-swasta-warga
- Kegiatan berbasis kolaborasi
- Pengembangan data penduduk yang dinamis dan personal
- Pengembangan akses layanan universal
- Automasi sistem perijinan
- Manajemen performa kinerja yang agile

Berpijak pada Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian Prioritas tersebut diatas. Sehingga seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi tuntutan seluruh Stakeholder di Provinsi DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah Penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tugas Pokok dan Fungsi

5.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan.
12. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum.
13. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.
14. Penyusunan profil kependudukan.
15. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

20. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Tujuan dan Sasaran

5.5. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tujuan yaitu **Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan.**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka panjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah **Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan.**

Penghargaan

5.6. Penghargaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024 meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja Penerima	Tanggal Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	17 Juni 2025	Wajib Pajak Tahun 2025 Kategori SKPD	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan kepada 30 wajib pajak terpilih dari berbagai jenis pajak
2	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	8 September 2025	Pengelolaan Kerasipan tingkat UKPD	Suku Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peringkat II dalam ajang Pengelolaan Kearsipan Tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar 96,70.

3	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	18 September 2025	Pengelolaan Arsip Terbaik	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	Peringkat I Pengelolaan Arsip Terbaik Kategori Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	5 November 2025	Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memperoleh Kategori A (Memuaskan) dengan nilai 81,28 berdasarkan hasil pengawasan kearsipan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	10 Desember 2025	Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Apresiasi kepada Bidang Data dan Informasi atas kontribusi terbaik dalam Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mewajibkan pendidikan bermutu untuk semua
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	10 Desember 2025	Knowledge Management Award	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Komunitas Jawa Belajar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan Knowledge Management Award 2025 untuk kategori Partisipatif yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	11 Desember 2025	Anugerah Humas Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Juara 2 dalam Kategori Komunikasi Publik
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	18 Desember 2025	Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja BERAKHLAK	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan dalam Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja BERAKHLAK dengan Kategori "BUDAYA KERJA RESPONSIF UNGGULAN I"
9	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	18 Desember 2025	Penghargaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan UKPD Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	22 Desember 2025	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai Badan Publik Informatif Terbaik dengan nilai 100



BAB VI

PENUTUP

BAB VI: PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Pendapatan LRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya“, maka sejak Tahun 2015 tidak ada lagi pendapatan yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/DPA/2025 tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp393.691.293.818,00, Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/DPA/2025 tanggal 28 April 2025 sebesar Rp390.230.222.754,00 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 100/P-DPA/2025 tanggal 25 September 2025 sebesar Rp376.552.109.809,00, Realisasi

Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp318.536.131.950,00 atau mencapai 84,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp376.552.109.809,00.

3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.146.394.000,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp331.455.345.860,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp306.308.951.860,00.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp208.799.722.941,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(306.308.951.860,00) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp318.467.811.450,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp(6.671.107.368,00), sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp214.287.475.163,00.
5. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp223.363.687.484,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp123.097.553.339,00, Aset Tetap sebesar Rp99.165.824.424,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.100.309.721,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.076.212.321,00 dan Rp214.287.475.163,00.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001



LAMPIRAN

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telp 3822263 Fax 3813523
Website: <http://inspektorat.jakarta.go.id> E-mail: inspektorat@jakarta.go.id
JAKARTA

**BERITA ACARA REKONSILIASI FOURPARTIED REVIU
LKPD TAHUN 2025**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan)

Pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, telah dilakukan rekonsiliasi dan pembahasan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tim Reviu Inspektorat, Tim Rekonsiliasi BPKD dan BPAD Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

I. Laporan Keuangan

a. Kelengkapan Penyampaian Laporan Keuangan

No.	PD/UKPD	Penyampaian Laporan Keuangan						
		Neraca	LO	LRA	LPE	LPSAL (khusus BLUD)	LAK (khusus BLUD)	CaLK
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√	√	√			X
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	√	√	√	√			√

Keterangan:

√ : sudah menyampaikan

x : belum menyampaikan

Atas penyampaian laporan keuangan yang disampaikan terdapat catatan sebagai berikut:

1. Atas laporan keuangan yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belum dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Atas Laporan Keuangan yang disampaikan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, telah seluruhnya dilengkapi.

b. Kelengkapan Data Dukung Laporan Keuangan

No	PD/UKPD	Dokumen Terkait Neraca					Dok LO	Dok LRA	Dok LPE
		Kas di Bend Pengeluaran	Piutang	Perse diaan	Aset	Utang			
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	√	√	√	√	√	√	√	√

√ : sudah menyampaikan

x : belum menyampaikan

Atas penyampaian data dukung laporan keuangan yang disampaikan, terdapat catatan sebagai berikut:

1. Atas data dukung laporan keuangan yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seluruh dokumen telah seluruhnya dilengkapi.
2. Atas data dukung laporan keuangan yang disampaikan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, seluruh dokumen telah seluruhnya dilengkapi

II. Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI)

A. LRA - Pendapatan

Tidak ada target dan realisasi pendapatan s.d 31 Desember 2025.

B. LRA - Belanja

1. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dialokasikan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp215.573.736.251,00 dengan realisasi senilai Rp167.998.348.586,00 (77,93%).

- a. Rekapitulasi kelebihan pembayaran belanja pegawai s.d. 31 Desember 2025, sisa kelebihan pembayaran belanja pegawai tahun-tahun sebelumnya:

No	Nama	Unit Kerja	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Penyetoran (Rp)	Keterangan
1	Heri Septiono	Dinas Dukcapil	866.340	866.340	Telah disetorkan ke SBPKD Jakarta Barat tanggal 28-4-2025 <u>Link :</u> https://drive.google.com/drive/folders/1J49SsqjSu_QR-81Xu_XBEFQTU8NygCO
2	Iman Doyo Mashur	Dinas Dukcapil	21.348.940	21.348.940	Telah disetorkan ke RKUD Provinsi DKI Jakarta tanggal 12-2-2025 <u>Link:</u> https://drive.google.com/drive/folders/1z8WY8yEZOVrXQ9c_pRO3IMCjclUTajbw
3	Abdul Rasid	Dinas Dukcapil	1.890.000	1.890.000	Telah disetorkan ke SBPKD Jakarta Barat tanggal 3-3-2025 <u>Link:</u> https://drive.google.com/drive/folders/1EgycpUV/LeetckBEjhdpmYD_JujZHWKzI
4	Wenny Evandiarie	Dinas Dukcapil	3.835.000	3.835.000	Telah disetorkan ke SBPKD Jakarta Barat tanggal 3-3-2025 <u>Link:</u> https://drive.google.com/drive/folders/1EgycpUV/LeetckBEjhdpmYD_JujZHWKzI

2. Belanja Hibah

Terdapat Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat berupa Penyediaan Hibah Blanko KTP-el dengan anggaran senilai Rp19.999.983.318,00 dan realisasi senilai Rp19.997.448.000,00 (99,99%).

Atas belanja hibah tersebut, Kementerian Dalam Negeri sedang berproses menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Hibah. Tidak ada sisa dana hibah di Kasda karena seluruh dana hibah telah dibelanjakan KTP-el sebanyak 1.964.000 buah dengan harga satuan Rp10.182,00.

3. Belanja Modal

- a. Target dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah sampling dengan rincian sebagai berikut:

No.	PD/UKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.243.188.374	1.046.115.029	84,15%
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	331.128.566	309.921.990	93,60%

Atas Realisasi Belanja Modal diketahui bahwa persentase realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 84,15% dan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar 93,60%. Realisasi anggaran sebesar 84,15% menunjukkan tingkat serapan yang cukup baik, namun masih terdapat sisa anggaran sekitar 15,85%. Hal ini terjadi karena efisiensi harga.

- b. Progres penginputan belanja modal ke dalam KIB (SIERA), termasuk reklaas belanja modal yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi asset di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah sampling dengan rincian sebagai berikut:

No.	PD/UKPD	Realisasi (Rp)	Input SIERA
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.046.115.029	1.046.115.029
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	309.921.990	309.921.990

Atas seluruh realisasi belanja tersebut sudah dilakukan penginputan ke dalam KIB (SIERA).

- c. Pelaksanaan pekerjaan yang melewati TA 2025 yang dilanjutkan ke tahun berikutnya, berapa yang menggunakan RPBATA/ Bank Garansi/ Utang Daerah

No.	PD/UKPD	RPBATA/ Bank Garansi/ Utang Daerah (Rp.)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	0

Tidak ada pekerjaan yang melewati TA 2025 yang dilanjutkan ke tahun berikutnya.

4. Belanja BLUD (khusus BLUD)

Bukan Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan keuangan BLUD

C. Neraca

1. Kas

- a. Pelaporan Kas per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sudah sesuai dengan Rekening Koran, dengan rincian sebagai berikut

No.	PD/UKPD	Neraca (Rp)	Rekening Koran (Rp)	Keterangan
-----	---------	-------------	---------------------	------------

1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	Sesuai
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	0	Sesuai

- b. Posisi Kas RPBATA dan Bank Garansi pada pelaksanaan pekerjaan yang melewati TA 2025

No.	PD/UKPD	Kas RPBATA dan Bank Garansi	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	Tidak ada
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	Tidak ada

Tidak terdapat saldo Kas RPBATA atas pelaksanaan pekerjaan yang melewati TA 2025.

2. Persediaan

- a. Saldo awal persediaan 2025 pada sistem e-persediaan sudah sesuai dengan nilai saldo persediaan 31 Desember 2024 *Audited*

No.	PD/UKPD	31 Desember 2024 Audited	Saldo Awal ePersediaan 2025	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46.328.121.497	46.328.121.497	Sudah Sesuai
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.441.448.271	1.441.448.271	Sudah Sesuai

Atas Saldo awal persediaan 2025 pada sistem e-persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelayanan Administrasi

Kependudukan sudah sesuai dengan nilai saldo persediaan 31 Desember 2024 *Audited*.

- b. Rekapitulasi pengadaan belanja barang dan jasa terkait persediaan, berapa yang diakui sebagai persediaan, berapa yang dikonfirmasi sebagai non-persediaan dan alasannya

No.	PD/UKPD	Belanja Barjas – BKU (Rp)	Persediaan (Rp)	Non-Persediaan (Rp)	Alasan dikonfirmasi sebagai Non- Persediaan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.652.156.465	1.967.078.541	123.252.150	BBM KDO
				652.445.376	Pemeliharaan
				320.144.710	Belanja Makanan dan Minuman
				4.529.968.087	Belanja Gaji PJLP
				1.755.763.119	Belanja Telepon, Air dan Listrik
				230.141.888	Belanja Sewa Mesin Fotocopy
				1.593.644.559	Belanja Jasa dan Honorarium
				8.123.000	Pajak, Bea, dan Perizinan
				233.100.000	Belanja Penjilidan Register Akta
				64.428.027	Belanja Bahan Cetak
2	Unit Pelayanan Administrasi	1.922.575.132	112.392.617	8.815.005	BBM KDO
				22.782.304	Pemeliharaan
				19.180.000	Belanja Makanan dan Minuman

No.	PD/UKPD	Belanja Barjas – BKU (Rp)	Persediaan (Rp)	Non-Persediaan (Rp)	Alasan dikonfirmasi sebagai Non- Persediaan
	Kependudukan			1.667.736.588	Belanja Gaji PJLP
				8.048.000	Belanja Paket Pengiriman
				52.545.158	Belanja Sewa Mesin Fotocopy
				233.000	Pajak, Bea, dan Perizinan
				30.842.460	Belanja Pakaian Dinas
	Jumlah	13.574.731.597	2.079.471.158	11.495.260.439	

Rekapitulasi pengadaan belanja barang yang diakui sebagai persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.967.078.541,00 dan yang dikonfirmasi sebagai non-persediaan sebesar Rp9.685.077.924. Adapun alasan pengadaan belanja barang dan jasa tersebut diakui sebagai non-persediaan karena digunakan untuk Belanja BBM KDO, Pemeliharaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Gaji PJLP, Belanja Telepon, Air dan Listrik, Belanja Sewa Mesin Fotocopy, Belanja Jasa dan Honorarium, Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Penjilidan Register Akta, Belanja Bahan Cetak, Belanja Sewa Gedung Pertemuan, dan Belanja Pakaian Dinas.

Rekapitulasi pengadaan belanja barang yang diakui sebagai persediaan pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp2.079.471.158,00 dan yang dikonfirmasi sebagai non-persediaan sebesar Rp11.495.260.439,00. Adapun alasan pengadaan belanja barang dan jasa tersebut diakui sebagai non-persediaan karena digunakan untuk Belanja Belanja BBM KDO, Pemeliharaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Gaji PJLP, Belanja Sewa Mesin Fotocopy, Pajak, Bea, dan Perizinan, dan Belanja Pakaian Dinas

- c. Masih terdapat perbedaan saldo persediaan pada Neraca dengan saldo persediaan FIFO dan persediaan fisik per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	PD/UKPD	Neraca (Rp)	BASO FIFO (Rp)	BASO Fisik	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.746.685.822	60.746.685.822	60.763.346.997	Belum sesuai
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.158.193.970	1.158.193.970	1.158.193.970	Sudah sesuai

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat perbedaan saldo persediaan pada Neraca dengan saldo persediaan FIFO dan persediaan fisik per 31 Desember 2025 karena stok barang lama sudah usang atau kadaluarsa sehingga tidak di distribusikan terlebih dahulu.

3. Aset Tetap dan Aset Lainnya

- a. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	PD/UKPD	KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.436.240.000	15.586.803.294	23.806.275.259	0	0	Sesuai dengan BA Rekon Aset
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	1.993.642.118	0	0	0	Sesuai dengan BA Rekon Aset

- b. Transfer Aset

Terdapat mobil Veloz yg akan ditransfer ke Sudindukcapil JB senilai Rp189.960.000,00. Atas hal tersebut, sudah tersedia BAST nomor 6981/T5.02 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Barat. Atas mutasi aset tersebut, telah dicatat

kedalam KIB B Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Barat.

c. Penghapusan Aset

Terdapat 3 (dua) SK penghapusan aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

1. SK Sekretaris Daerah Nomor 151 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris sebanyak 91 unit pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan senilai Rp273.406.000,00.

Terhadap SK Penghapusan Barang Milik Daerah ini, belum ditindaklanjuti dengan mengeluarkan BMD dari pencatatan KIB yang terkait.

2. SK Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 9 unit pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp268.700.000,00. Terhadap SK Penghapusan Barang Milik Daerah ini, sudah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan BMD dari pencatatan KIB yang terkait.

3. SK Sekretaris Daerah Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris sebanyak 210 register pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara senilai Rp1.518.967.809,00. Terhadap SK Penghapusan Barang Milik Daerah ini, sudah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan BMD dari pencatatan KIB yang terkait.

4. Piutang

Tidak terdapat piutang per 31 Desember 2025

5. Utang

- a. Pengakuan utang belanja pihak ketiga, termasuk atas pelaksanaan pekerjaan yang melewati TA 2025

No.	PD/UKPD	Utang Belanja Pihak Ketiga	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.928.000	Belanja Jasa Penyimpanan Arsip (RPBATA) <u>Link:</u> https://drive.google.com/drive/folders/1KH6c1o4UvezqNon8JBgtm7SH1ALLGkc
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	-

Terdapat pengakuan utang belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp71.928.000,00 terdiri dari:

- Belanja Jasa Non TALI senilai Rp71.928.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Belanja Jasa Penyimpanan Arsip.

b. Penganggaran pembayaran utang pada TA 2026

No.	PD/UKPD	Utang Belanja Pihak Ketiga	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	-
2	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak memiliki pembayaran utang pada Tahun Anggaran 2026.

D. Isu Khusus

Hasil Uji Lalk Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI, menyatakan bahwa Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Jalan S. Parman No. 7, Jakarta Barat, sudah tidak layak digunakan dan direkomendasikan untuk dilakukan Rehab Total. Dinyatakan tidak layak digunakan karena Gedung sudah usang, hydrant sudah tidak aktif, jalur evakuasi tidak dapat digunakan, kuota penyimpanan arsip register akta pencatatan sipil sudah tidak mencukupi. Atas hal tersebut sudah diusulkan untuk Rehab Total di tahun anggaran 2025 dan 2026 tetapi tidak terealisasi karena terkena dampak efisiensi anggaran.

E. TL LHP BPK atas LKPD Tahun 2024

Progres TL dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian TL apabila TL belum selesai.

TL LHP BPK sudah seluruhnya selesai ditindaklanjuti, penyelesaian Pengembalian Belanja Pegawai a.n Wenny Evandiarie dan Abdul Rasid, sebagaimana dokumen pada Link GDrive.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1EgycpUVLeefcKBEjhdpmYD_JujZHWKzI

III. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Penyajian di LK

1. Hasil Prosedur Analitis

Hasil prosedur analitis terhadap kesesuaian angka yang tercatat pada LRA, Neraca, LO, maupun LPE, tidak ditemukan perbedaan maupun kesalahan hitung yang perlu menjadi koreksi.

2. Jurnal Koreksi

Terdapat usulan jurnal koreksi revidi berupa Belanja Jasa Telepon tagihan bulan Desember 2025 (pemakaian November 2025) senilai Rp260.850,00 pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur.

B. Kecukupan Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan belum disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan telah menyampaikan Catatan atas Laporan Keuangan.

IV. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Terhadap SK Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris sebanyak 91 register pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan senilai Rp273.406.000,00, belum ditindaklanjuti dengan mengeluarkan BMD dari pencatatan KIB yang terkait
2. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan Oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya

V. Saran/ Rekomendasi

Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta UKPD nya untuk:

1. Melakukan input Koreksi Penghapusan Barang Milik Daerah di SIERA sesuai Surat Keputusan Sekda tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Jakarta, 19 Februari 2026

Para Pihak Penandatanganan,

Tim Inspektorat,

1. Roslana
2. Anro Ongat Yovalti

Tim BPKD

1. M. Akbar Prayoga Putra

Tim Dinas Dukcapil

1. Vina Hasnawati
2. Sudarman Tetra
3. Nita Noerhayati

Tim BPAD

1. Nabil Ahmad

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
I. PENDAPATAN PAJAK		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang : Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

SECRET

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 dari OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PENDAPATAN RETRIBUSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

ASUTED

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi dari LK Investee	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

SLIDE 2

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengumuman Dividen untuk Investasi dgn Metode Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4. LAIN-LAIN PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelesaian Piutang KLB/KDB	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

SI-000000

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Pendapatan Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Surplus/Defisit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5. PENDAPATAN HIBAH	25.146.394.000,00	25.146.394.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

11/11/2025

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Pinang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Pinang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Pinang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Penambahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Pinang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Pinang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Non LRA	25.146.394.000,00	25.146.394.000,00	0,00	0,00
Penambahan :	25.146.394.000,00	25.146.394.000,00	0,00	0,00
Donasi/Hibah Aset Tetap Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

LEMBAGA

JENIS PENDAPATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	25.146.394.000,00	25.146.394.000,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LO	25.146.394.000,00	25.146.394.000,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

A.0111.0

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
I. PENDAPATAN PAJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang : Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan:	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

ACQUITTÉ

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 dari OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PENDAPATAN RETRIBUSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AL 0113.0

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi dari LK Investee	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Pinang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Pinang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengumuman Dividen untuk Investasi dgn Metode Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4. LAIN-LAIN PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Pinang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Pinang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelesaian Pinang KLB/KDB	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AT 00100

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Pendapatan Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Kas yang Dihatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Surplus/Defisit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5. PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disejor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

A001153

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Casat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Penambahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Casat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Donasi/Hibah Aset Tetap Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS PENDAPATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

ASUTKEM

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
I. PENDAPATAN PAJAK	0,00	0,00
Pendapatan Pajak - LRA	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00
Piutang : Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2024	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00
Pengurangan:	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 dari OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00
2. PENDAPATAN RETRIBUSI	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi - LRA	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

A107110

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Pengurangan :	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi dari LK Investee	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AKTIF

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Pengumuman Dividen untuk Investasi dgn Metode Ekuitas	0,00	0,00
4. LAIN-LAIN PAD	0,00	0,00
Lain-Lain PAD - LRA	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00
Penyelesaian Piutang KLB/KDB	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

NOTES

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Pendapatan Non LRA	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Surplus/Defisit 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00
5. PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00
Pendapatan Hibah LRA	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00
Pendapatan Belas Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Piutang Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Penambahan Lainnya	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2024	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pendapatan Belum Diseter per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 ke OPD Lain	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Non LRA	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00
Donasi/Hibah Asst Tetap Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PENDAPATAN LO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

51.2011.20

JENIS PENDAPATAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Donasi/Hibah Penerimaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00

Bendahara Penerimaan
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Provinsi DKI Jakarta,

Pejabat Penatausahaan Keuangan
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Provinsi DKI Jakarta,


MUHAMMAD NURRAHMAN
196811081998031003

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
L. BEBAN PEGAWAI	166.827.214.844,00	166.827.214.844,00	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - NON BLUD	166.827.214.844,00	166.827.214.844,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Non BLUD - LRA	167.998.348.586,00	167.998.348.586,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOP, BOS dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2025	8.819.212.911,00	8.819.212.911,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	9.990.346.653,00	9.990.346.653,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Beban Nnn Pegawai BLUD ke Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Non Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja Pegawai BLUD yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BEBAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
A. BEBAN BARANG	40.746.235.107,00	2.450.304.707,00	4.065.282.113,00	6.474.591.422,00
BEBAN BARANG - NON BLUD	40.746.235.107,00	2.450.304.707,00	4.065.282.113,00	6.474.591.422,00
Belanja Barang - LRA	27.137.423.371,00	2.950.341.716,00	5.193.577.441,00	4.124.459.477,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOP, BOS dan BOP Kesetiaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2024	108.384.914.375,00	46.328.121.497,00	7.141.257.192,00	7.870.235.079,00
MUTASI BEBAN BARANG OPERASIONAL SKPD/UKPD NON COVID	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	189.223.660,00	37.351.044,00	22.642.897,00	8.996.057,00
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	392.138.565,00	11.157.525,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	64.170.000,00	0,00	0,00	64.170.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakontabel	903.466.975,00	18.969.025,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari OPD Lain	11.536.329.995,00	0,00	1.196.393.150,00	2.094.366.500,00
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	25.146.394.000,00	25.146.394.000,00	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Barang atas Pengembalian Obat	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	510.192.852,00	47.893.823,00	29.497.754,00	51.768.019,00
Transfer Keluar Persediaan ke OPD Lain	11.532.722.495,00	11.513.622.495,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lebih Cant Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Beban Barang Menjadi Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Obat yang Belum Diterima Kasnya (Dana APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI BEBAN BARANG PENANGANAN COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan Non BTT dari SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan Non BTT ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dana BTT ke Aset Tetap/ Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2025	120.964.910.487,00	60.480.513.782,00	9.459.090.813,00	7.635.867.672,00
Persediaan untuk Penanganan Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan bukan untuk Penanganan Covid (Operasional SKPD)	120.964.910.487,00	60.480.513.782,00	9.459.090.813,00	7.635.867.672,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
BEBAN BARANG - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang BLUD ke Aset Tetap/Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Behan Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Obat yang Belum Diterima Kasnya (Dana BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja BLUD yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLUD Dibayar di Muka per 31 Des 2024 (c-toll)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLUD Dibayar di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Barang atas Pengembalian Obat	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BEBAN JASA	86.420.273.033,00	8.304.887.212,00	11.824.803.239,00	11.212.990.410,00
Belanja Jasa - LRA	86.594.983.891,00	8.301.278.653,00	11.824.803.239,00	11.211.211.368,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Jasa BOP dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Des 2025	185.071.410,00	93.876.033,00	0,00	21.021.380,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

AUDITED

REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	16.761.000,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	191.543.268,00	90.267.474,00	0,00	19.242.338,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Beban Jasa Menjadi Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C. BEBAN PEMELIHARAAN	2.539.592.293,00	400.536.096,00	157.891.728,00	153.319.360,00
Belanja Pemeliharaan - LRA	3.682.892.293,00	400.536.096,00	157.891.728,00	153.319.360,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pemeliharaan BOP dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	294.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	1.437.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pemeliharaan Jasa Menjadi Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembiayaan Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
D. BEBAN PERJALANAN DINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

AUDITED

REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
E. BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA (A + B + C + D + E)	129.706.100.433,00	11.155.728.015,00	16.047.977.080,00	17.840.991.192,00
3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	14.956.042.208,00	1.071.474.555,00	739.277.392,00	830.073.692,00
a. Peralatan dan Mesin	13.846.210.170,00	894.794.592,00	739.277.392,00	825.542.690,00
b. Gedung dan Bangunan	856.137.735,00	176.147.163,00	0,00	0,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.152.307,00	0,00	0,00	0,00
d. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Aset Lainnya	189.541.956,00	532.800,00	0,00	4.531.002,00
4. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEBAN SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
6. BEBAN HIBAH	19.997.448.000,00	19.997.448.000,00	0,00	0,00
Beban Hibah LRA	19.997.448.000,00	19.997.448.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah - LRA	19.997.448.000,00	19.997.448.000,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Hibah BOS dan BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Behan	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengurang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal 2025 yang Diserahkan ke Pihak Lain/Masyarakat/Personel	0,00	0,00	0,00	0,00
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar OPD (Selain Belanja Modal 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Belanja Hibah Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Akhir dari Barang Yang Belum Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7. BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

AUDITED

REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

JENIS BEBAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Des. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8. BEBAN LAIN-LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	331.486.805.485,00	199.051.865.414,00	16.787.254.472,00	18.670.974.884,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
1. BEBAN PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - NON BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Non BLUD - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOP, BOS dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Beban Non Pegawai BLUD ke Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Non Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja Pegawai BLUD yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BEBAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
A. BEBAN BARANG	7.718.373.565,00	7.743.411.464,00	9.884.302.231,00	323.367.211,00
BEBAN BARANG - NON BLUD	7.718.373.565,00	7.743.411.464,00	9.884.302.231,00	323.367.211,00
Belanja Barang - LRA	3.773.072.250,00	6.273.596.227,00	3.995.763.363,00	463.281.415,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOP, BOS dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2024	16.979.750.361,00	9.689.118.967,00	18.015.037.376,00	342.652.417,00
MUTASI BEBAN BARANG OPERASIONAL SKPD/UKPD NON COVID	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	21.307.953,00	15.338.136,00	67.072.932,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	8.349.600,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakontabel	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari OPD Lain	2.537.024.220,00	2.227.427.600,00	3.283.780.500,00	43.000.245,00
Dosasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Barang atas Pengembalian Obat	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

AUDITED

REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	80.885.326,00	4.857.073,00	261.781.087,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang ke Behan Non Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lebih Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Beban Barang Menjadi Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Obat yang Belum Diterima Kasnya (Dana APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI BEBAN BARANG PENANGANAN COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan Non BTT dari SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan Non BTT ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dana BTT ke Aset Tetap / Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2025	15.520.245.493,00	10.457.212.393,00	15.215.570.853,00	525.566.866,00
Persediaan untuk Penanganan Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan bukan untuk Penanganan Covid (Operasional SKPD)	15.520.245.493,00	10.457.212.393,00	15.215.570.853,00	525.566.866,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
BEBAN BARANG - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang BLUD ke Aset Tetap/Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Obat yang Belum Diterima Kasnya (Dana BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja BLUD yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLUD Dibayar di Muka per 31 Des 2024 (e-soll)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLUD Dibayar di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Barang atas Pengembalian Obot	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BEBAN JASA	14.956.567.172,00	17.498.217.888,00	17.102.549.645,00	1.249.189.472,00
Belanja Jasa - LRA	14.952.744.496,00	17.492.227.212,00	17.124.222.456,00	1.249.189.472,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Jasa BOP dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Des 2025	27.138.221,00	27.685.155,00	15.350.621,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	23.315.545,00	21.694.479,00	37.023.432,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Beban Jasa Menjadi Utang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C. BEBAN PEMELIHARAAN	404.424.388,00	258.071.806,00	276.840.961,00	39.627.000,00
Belanja Pemeliharaan - LRA	404.424.388,00	258.071.806,00	276.840.961,00	39.627.000,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pemeliharaan BOP dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Cetak Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pemeliharaan Jasa Menjadi Utang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
D. BEBAN PERJALANAN DINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
E. BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA (A + B + C + D + E)	23.079.365.125,00	25.499.701.158,00	27.263.692.837,00	1.612.183.683,00
3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	957.524.338,00	1.147.087.766,00	1.897.710.980,00	160.802.057,00
a. Peralatan dan Mesin	957.524.338,00	956.166.227,00	1.326.594.350,00	160.802.057,00
b. Gedung dan Bangunan	0,00	174.103.379,00	505.887.193,00	0,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	64.152.307,00	0,00
d. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Aset Lainnya	0,00	16.818.160,00	1.077.120,00	0,00
4. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEBAN SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00

JENIS BERAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Des 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Des 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

AUDITED

REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
6. BEBAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Hibah BOS dan BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengurang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal 2025 yang Diserahkan ke Pihak Lain/Masyarakat/Personel	0,00	0,00	0,00	0,00
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar OPD (Selain Belanja Modal 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Belanja Hibah Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Akhir dari Barang Yang Belum Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7. BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Lebih Citat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Citat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8. BEBAN LAIN-LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	24.036.889.463,00	26.646.788.924,00	29.161.403.817,00	1.772.985.740,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
1. BEBAN PEGAWAI	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - NON BLUD	0,00	0,00
Belanja Pegawai Non BLUD - LRA	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOP, BOS dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Cinat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pegawai	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pegawai	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Bebas	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Cutat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimaka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi Beban Non Pegawai BLUD ke Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Non Pegawai BLUD	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja Pegawai BLUD yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
2. BEBAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00
A. BEBAN BARANG	1.536.956.829,00	549.645.565,00
BEBAN BARANG - NON BLUD	1.536.956.829,00	549.645.565,00
Belanja Barang - LRA	192.101.400,00	171.230.082,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOP, BOS dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2024	577.293.215,00	1.441.448.271,00
MUTASI BEBAN BARANG OPERASIONAL SKPD/UKPD NON COVID	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	16.036.714,00	477.927,00
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	372.631.440,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	884.497.950,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari OPD Lain	59.378.990,00	94.958.790,00
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	0,00	0,00
Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual	0,00	0,00
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00	0,00
Penerimaan Barang atas Pengembalian Obat	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Dikurangi	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain	0,00	0,00
Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	32.322.235,00	1.187.535,00
Transfer Keluar Persediaan ke OPD Lain	19.100.000,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Persediaan	0,00	0,00
Lebih Catat Persediaan Awal	0,00	0,00
Koreksi Beban Barang Menjadi Uang Muka	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Obat yang Belum Diterima Kasnya (Dana APBD)	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
MUTASI BEBAN BARANG PENANGANAN COVID	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan Non BTT dari SKPD Lain	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan Non BTT ke SKPD Lain	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dana BTT ke Aset Tetap / Aset Lain-lain	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2025	513.560.645,00	1.157.281.970,00
Persediaan untuk Penanganan Covid	0,00	0,00
Persediaan bukan untuk Penanganan Covid (Operasional SKPD)	513.560.645,00	1.157.281.970,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
BEBAN BARANG - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang BLUD ke Aset Tetap/Lain-lain	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Obat yang Belum Diterima Kasnya (Dana BLUD)	0,00	0,00
Ditambah:	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja BLUD yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Cotat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Belanja Barang BLUD Dibayar di Muka per 31 Des 2024 (e-toll)	0,00	0,00
Belanja Barang BLUD Dibayar di Muka per 31 Des 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Behan Barang BLUD	0,00	0,00
Penerimaan Barang atas Pengembalian Obat	0,00	0,00
B. BEBAN JASA	2.542.505.249,00	1.728.562.746,00
Belanja Jasa - LRA	2.710.744.249,00	1.728.562.746,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Koreksi Belanja Jasa BOP dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Des 2025	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	16.761.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	185.000.000,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Beban Jasa Menjadi Uang Muka	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
C. BEBAN PEMELIHARAAN	826.098.650,00	22.782.304,00
Belanja Pemeliharaan - LRA	1.969.398.650,00	22.782.304,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pemeliharaan BOP dan BOP Kesetaraan	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Uang Belanja Pemeliharaan per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	294.150.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Bahan Pemeliharaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	1.437.450.000,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Pemeliharaan Jasa Menjadi Uang Muka	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
D. BEBAN PERJALANAN DINAS	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas - LRA	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
E. BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA (A + B + C + D + E)	4.905.560.728,00	2.300.990.615,00
3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.969.630.476,00	182.460.952,00
a. Peralatan dan Mesin	7.803.047.562,00	182.460.952,00
b. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
d. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
e. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
f. Aset Lainnya	166.582.914,00	0,00
4. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00
5. BEBAN SUBSIDI	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
6. BEBAN HIBAH	0,00	0,00
Beban Hibah LRA	0,00	0,00
Belanja Hibah - LRA	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Koreksi Belanja Hibah BOS dan BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
Koreksi Pengurang Lainnya	0,00	0,00
Beban Hibah Non LRA	0,00	0,00
Belanja Modal 2025 yang Diserahkan ke Pihak Lain/Masyarakat/Personel	0,00	0,00
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar OPD (Selain Belanja Modal 2025)	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Belanja Hibah Barang	0,00	0,00
Persediaan Akhir dari Barang Yang Belum Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
7. BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial - LRA	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Des 2025	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

JENIS BEBAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	0,00	0,00
8. BEBAN LAIN-LAIN	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	12.875.191.204,00	2.483.451.567,00

Bendahara Pengeluaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Provinsi DKI Jakarta,



198407312010012027

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Provinsi DKI Jakarta,



MUHAMMAD NURRAHMAN

196811181998031003

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITFD

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	(4,00)	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2025)	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	2.345.301.671,00	2,00	1.905.319.626,00	
Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Buruk Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dsb	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2025)	0,00	0,00	0,00	
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	17.925.625,00	17.925.625,00	0,00	
Penyesuaian Persediaan	0,00	0,00	0,00	
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Pendapatan	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya)	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Penyajian Saldo Awal Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Utang	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00	
Pengakuan Kas atas Bantuan Sosial yang Belum Disalurkan	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Kas BLUD sebelum terbit Pergub Tarif BLUD	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN	2.363.227.292,00	17.925.627,00	1.905.319.626,00	
Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2024 atas Temuan	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2024)	0,00	0,00	0,00	
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	17.925.625,00	17.925.625,00	0,00	
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	7.898.452.309,00	5.016.142.220,00	1.962.810.426,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2024)	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Persediaan	0,00	0,00	0,00	
Lebih Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Pendapatan	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Utang	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	0,00	0,00	0,00	
Penyesunian Kas BLUD	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	0,00	0,00	0,00	
Setoran Kas Pembubaran OPD/BLUD	0,00	0,00	0,00	
Penyesuaian Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Kurang Catat Utang Restitusi	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat	0,00	0,00	0,00	
Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN	7.916.377.934,00	5.034.067.845,00	1.962.810.426,00	
JUMLAH KOREKSI EKUITAS	(5.553.150.642,00)	(5.016.142.218,00)	(57.490.800,00)	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0,00		
Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya		0,00		
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya		0,00		
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2025)		0,00		
Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap		0,00		
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		0,00		
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		433.662.045,00		
Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dsb		0,00		
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2025)		0,00		
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel		0,00		
Penyesuaian Persediaan		0,00		
Kurang Catat Persediaan Awal		0,00		
Penyesuaian Pendapatan		0,00		
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024		0,00		
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2024		0,00		

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya)		0,00		
Koreksi Penyajian Saldo Awal Penyisihan Piutang		0,00		
Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang		0,00		
Penyesuaian Utang		0,00		
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024		0,00		
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD		0,00		
Penyesuaian Lainnya		0,00		
Koreksi Lebih Catat Lainnya		0,00		
Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman		0,00		
Pengakuan Kas atas Bantuan Sosial yang Belum Disalurkan		0,00		
Penerimaan Kas BLUD sebelum terbit Pergub Tarif BLUD		0,00		
JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN		433.662.045,00		
Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0,00		
Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya		0,00		
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya		0,00		

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2024 atas Temuan		0,00		
Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2024)		0,00		
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel		0,00		
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		0,00		
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		791.229.655,00		
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2024)		0,00		
Penyesuaian Persediaan		0,00		
Lebih Catat Persediaan Awal		0,00		
Penyesuaian Pendapatan		0,00		
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024		0,00		
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2024		0,00		
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024		0,00		
Koreksi Kurang Catat Lainnya		0,00		
Penyesuaian Utang		0,00		
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024		0,00		

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD		0,00		
Penyesuaian Kas BLUD		0,00		
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD		0,00		
Setoran Kas Pembubaran OPD/BLUD		0,00		
Penyesuaian Lainnya		0,00		
Kurang Catat Utang Restitusi		0,00		
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat		0,00		
Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00		
JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN		791.229.655,00		
JUMLAH KOREKSI EKUITAS		(357.567.610,00)		

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	
Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	(4,00)	
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2025)	0,00	
Koreksi Reklasifikasi Ekstrakontabel menjadi Aset Tetap	0,00	
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00	
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	6.319.998,00	
Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dsb	0,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2025)	0,00	
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakontabel	0,00	
Penyesuaian Persediaan	0,00	
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00	
Penyesuaian Pendapatan	0,00	
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	0,00	
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2024	0,00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya)	0,00	
Koreksi Penyajian Saldo Awal Penyisihan Piutang	0,00	
Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	0,00	
Penyesuaian Utang	0,00	
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	0,00	
Penyesuaian Lainnya	0,00	
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00	
Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman	0,00	
Pengakuan Kas atas Bantuan Sosial yang Belum Disalurkan	0,00	
Penerimaan Kas BLUD sebelum terbit Pengub Tarif BLUD	0,00	
JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN	6.319.994,00	
Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	
Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2024 atas Temuan	0,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2024)	0,00	
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	0,00	
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00	
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	128.270.008,00	
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2024)	0,00	
Penyesuaian Persediaan	0,00	
Lebih Catat Persediaan Awal	0,00	
Penyesuaian Pendapatan	0,00	
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2024	0,00	
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2024	0,00	
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	0,00	
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	
Penyesuaian Utang	0,00	
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2024	0,00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

AUDITED

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	0,00	
Penyesuaian Kas BLUD	0,00	
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	0,00	
Seioran Kas Pembubaran OPD/BLUD	0,00	
Penyesuaian Lainnya	0,00	
Kurang Catat Utang Restitusi	0,00	
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat	0,00	
Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	
JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN	128.270.008,00	
JUMLAH KOREKSI EKUITAS	(121.950.014,00)	

Bendahara Pengeluaran
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Provinsi DKI Jakarta,



Yulia Mariani

198407312010012027

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Provinsi DKI Jakarta,



MUHAMMAD NURRAHMAN

196811181998031003



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Detail Rincian)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa UPKG/TU/LS TA 2024 yang Disetor Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD dan Sekolah Tahun 2024 yang Belum Disetor	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyetoran Pengembalian Belanja Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya, Kas Lainnya dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran Pendapatan Belum Disetor Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
RK PPKD - KAS	256.967.775.545,00	200.694.068.080,00	17.722.638.528,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)
MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Lampiran Bapok)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Mutasi Tambah:	256.967.775.545,00	200.694.068.080,00	17.722.638.528,00	0,00
Realisasi Belanja per 31 Des 2025	256.967.775.545,00	200.694.068.080,00	17.722.638.528,00	0,00
Sisa UP/GU Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa TU Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa LS Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinang Kelebihan Penyetoran Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan Kas BLUD yang Diterima setelah Pembubaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembubaran Kas BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dropping Dana BOS Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Lain-Lain Sekolah Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja BOS dan BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Ribu)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Jasa Giro Bansos Escrow yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Sebelum Tahun 2025 di Rekening Escrow	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan - LRA per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Sekolah Tahun Anggaran 2025 yg terdapat di BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro Bansos Escrow yang Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyetoran Kas BLUD ke BUD Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
RK PPKD - NON KAS	(11.603.860.952,00)	(11.556.766.071,00)	2.178.530.918,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Mutasi Tambah:	6.956.757.514,00	727.255.064,00	2.186.537.570,00	0,00
Penambahan Aset Tetap & Lain-lain:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD Lain	2.672.381.760,00	212.548.500,00	990.144.420,00	0,00
Hasil Tukar Guling	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihapuskan	542.106.000,00	268.700.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	259.070.014,00	246.006.564,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Roislag	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Persediaan:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	3.483.199.740,00	0,00	1.196.393.150,00	0,00
Penyesuaian Utang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Penyesuaian Piutang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 dari SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan Dana BTT untuk Penanganan Covid:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Persediaan melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Aset Tetap melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Lainnya melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembelian Aset Tetap yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembayaran Lainnya yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	18.560.618.466,00	12.284.021.135,00	8.006.652,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Pengurangan Aset Tetap & Lain-Lain:	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	542.106.000,00	268.700.000,00	0,00	0,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain	6.267.292.315,00	307.220.940,00	0,00	0,00
Aset Tetap Yang Diukir Guling/Ruislag	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD Lain	218.497.656,00	194.477.700,00	8.006.652,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Hasil Tukar Guling	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Persediaan:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	11.532.722.495,00	11.513.622.495,00	0,00	0,00
Penyesuaian Utang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Piutang:	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	1	2	3	4
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembagian BTT PPKD ke UKPD di Bawahnya:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Persediaan melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Aset Tetap melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Lainnya melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Lainnya:	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelesaian Piutang KLB/KDB	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI RK PPKD	245.363.914.593,00	189.137.302.009,00	19.901.169.446,00	0,00
RK PPKD PER 31 Des 2025	245.363.914.593,00	189.137.302.009,00	19.901.169.446,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa UP/GLU/TU/LS TA 2024 yang Disetor Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD dan Sekolah Tahun 2024 yang Belum Disetor	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyetoran Pengembalian Belanja Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya, Kas Lainnya dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran Pendapatan Belum Disetor Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
RK PPKD - KAS	0,00	24.263.278.498,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Mutasi Tambah:	0,00	24.263.278.498,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja per 31 Des 2025	0,00	24.263.278.498,00	0,00	0,00
Sisa UP/GU Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa TU Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa LS Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Penyelesaian Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan Kas BLUD yang Diterima setelah Pembubaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembubaran Kas BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dropping Dana BOS Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Lain-Lain Sekolah Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja BOS dan BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Dikawatir

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Jasa Giro Bansos Escrow yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Sebelum Tahun 2025 di Rekening Escrow	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan - LRA per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Sekolah Tahun Anggaran 2025 yg terdapat di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro Bansos Escrow yang Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyetoran Kas BLUD ke BUD Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
RK PPKD - NON KAS	0,00	3.681.103.136,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Mutasi Tambah:	0,00	3.970.522.440,00	0,00	0,00
Penambahan Aset Tetap & Lain-lain:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD Lain	0,00	1.469.688.840,00	0,00	0,00
Hasil Tukar Guling	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihapuskan	0,00	273.406.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Aset Tetap Yang Ditykar Guling/Ruislag	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Persediaan:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	0,00	2.227.427.600,00	0,00	0,00
Penyesuaian Utang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Penyesuaian Platang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Pinang Tahun 2024 dari SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan Dana BTT untuk Penanganan Covid:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Persediaan melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Aset Tetap melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Lainnya melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembelian Aset Tetap yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembayaran Lainnya yang berasal dari BTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	289.419.304,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)
MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Pengurangan Aset Tetap & Lain-Lain:	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	273.406.000,00	0,00	0,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD Lain	0,00	16.013.304,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Hasil Tukar Guling	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Persediaan:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Utang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Piutang:	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Ribu)

URAIAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
	5	6	7	8
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembagian BTT PPKD ke UKPD di Bawahnya:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Persediaan melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Aset Tetap melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Lainnya melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Lainnya:	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelesaian Piutang KLB/KDB	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI RK PPKD	0,00	27.944.381.634,00	0,00	0,00
RK PPKD PER 31 Des 2025	0,00	27.944.381.634,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	0,00	0,00
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	0,00	0,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2024	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
Sisa UP/GU/TU/LS TA 2024 yang Disetor Tahun 2025	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD dan Sekolah Tahun 2024 yang Belum Disetor	0,00	0,00
Penyetoran Pengembalian Belanja Tahun 2024	0,00	0,00
Setoran Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya, Kas Lainnya dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Setoran Pendapatan Belum Disetor Tahun 2024	0,00	0,00
Setoran atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00
RK PPKD - KAS	14.287.790.439,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Mutasi Tambah:	14.287.790.439,00	0,00
Realisasi Belanja per 31 Des 2025	14.287.790.439,00	0,00
Sisa UP/GU Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Sisa TU Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Sisa LS Tahun Anggaran 2025 yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Penyetoran Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penambahan Kas BLUD yang Diterima setelah Pembubaran	0,00	0,00
Penerimaan Pembubaran Kas BLUD	0,00	0,00
Jasa Giro yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penerimaan Dropping Dana BOS Tahun 2025	0,00	0,00
Penerimaan Lain-Lain Sekolah Tahun 2025	0,00	0,00
Realisasi Belanja BOS dan BOP Kesetaraan Swasta	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Jasa Giro Bansos Escrow yang Belum Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Sebelum Tahun 2025 di Rekening Escrow	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
Pendapatan - LRA per 31 Des 2025	0,00	0,00
Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2025	0,00	0,00
Koreksi Belanja Tahun Berjalan	0,00	0,00
Kas Sekolah Tahun Anggaran 2025 yg terdapat di BUD	0,00	0,00
Jasa Giro Bansos Escrow yang Disetor per 31 Des 2025	0,00	0,00
Penyetoran Kas BLUD ke BUD Tahun 2025	0,00	0,00
RK PPKD - NON KAS	(5.906.728.935,00)	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Mutasi Tambah:	72.442.440,00	0,00
Penambahan Aset Tetap & Lain-lain:	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD Lain	0,00	0,00
Hasil Tukar Guling	0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihapuskan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	13.063.450,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag	0,00	0,00
Penyesuaian Persediaan:	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	59.378.990,00	0,00
Penyesuaian Utang:	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2024	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

MUTASI RK PPKD PENGGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Penyesuaian Piutang:	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2024 dari SKPD Lain	0,00	0,00
Penggunaan Dana BTT untuk Penanganan Covid:	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Pembelian Persediaan melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Pembelian Aset Tetap melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Pembayaran Lainnya melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) yang berasal dari BTT	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD yang berasal dari BTT	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembelian Aset Tetap yang berasal dari BTT	0,00	0,00
Transfer Masuk dari SKPD untuk Pembayaran Lainnya yang berasal dari BTT	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	5.979.171.375,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)
MUTASIRK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Dalam Rincian

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Pengurangan Aset Tetap & Lain-Lain:	0,00	0,00
Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	0,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain	5.960.071.375,00	0,00
Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Reislag	0,00	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi:	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD Lain	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Hasil Tukar Guling	0,00	0,00
Penyesuaian Persediaan:	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	19.100.000,00	0,00
Penyesuaian Utang:	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2024	0,00	0,00
Penyesuaian Piutang:	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)
MUTASI RK PPKD PENGABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Lampiran Regional)

URAIAN	UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN	UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	9	10
Transfer Keluar Piutang Tahun 2024 ke SKPD Lain	0,00	0,00
Pembagian BTT PPKD ke UKPD di Bawahnya:	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Pembelian Persediaan melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Pembelian Aset Tetap melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Pembayaran Lainnya melalui BTT Anggaran PPKD	0,00	0,00
Penyesuaian Lainnya:	0,00	0,00
Penyelesaian Piutang KLB/KDB	0,00	0,00
MUTASI RK PPKD	8.381.061.504,00	0,00
RK PPKD PER 31 Des 2025	8.381.061.504,00	0,00